

**PENGARUH INVESTASI, PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH
TANGGA, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
KESEMPATAN KERJA SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI**

**Diah Windu Antari
Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

E-mail : nikadekdiahwindu@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja serta kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan jumlah pengamatan 72 pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja, investasi dan pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesempatan kerja tidak memediasi pengaruh investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : *Investasi, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Pemerintah, Kesejahteraan Masyarakat*

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of investment, household consumption expenditure and government expenditure on employment opportunities and community welfare in the regencies / cities of Bali Province. The data used are secondary data, with 72 observations. The analysis technique used is path analysis. The results showed that, household consumption expenditure and government expenditure had a positive effect on employment opportunities, investment and household consumption expenditure had a positive effect on people's welfare. Government expenditure and employment opportunities do not have a positive effect on people's welfare. Job opportunities do not mediate the effect of investment, household consumption expenditure, and government expenditure on community welfare.

Keywords: Investment, Household Consumption Expenditures, Government Expenditures, Community Welfare

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya diharapkan oleh setiap daerah, tetapi juga diharapkan oleh kabupaten/kota Provinsi Bali (Pratama, 2019). Untuk meningkatkan pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah merancang berbagai upaya agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Konsep kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan dengan konsep kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan dalam sebuah keluarga sangat ditentukan oleh besarnya pendapatan dari keluarga tersebut. Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh seseorang atas keikutsertaannya dalam proses produksi barang dan jasa (Heryendi & Marhaeni, 2013). Perbedaan tingkat pendapatan menyebabkan keanekaragaman taraf konsumsi di masyarakat atau individu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka konsumsinya juga semakin beragam, selain untuk kebutuhan primer, seperti sandang, pangan, dan papan tetapi juga konsumsi dalam bentuk pendidikan dan kesehatan. Sehingga dapat diartikan bahwa pendapatan dan konsumsi merupakan variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan, karena baik secara individu maupun rumah tangga dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan manusia (Wagle et al. 2006:75).

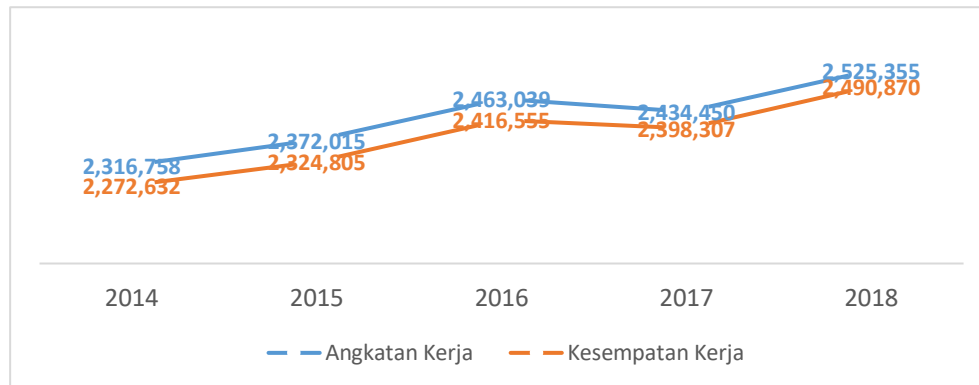
Suatu proses pembangunan dinyatakan berhasil apabila terjadi kenaikan pendapatan masyarakat yang dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja dan kestabilan harga. Agar hal tersebut dapat terjadi diperlukannya peran serta pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan agar tujuan atau sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu cara yang

dilakukan pemerintah untuk melakukan intervensi dalam perekonomian, meningkatnya belanja pemerintah daerah akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat (Kusuma, 2016). Pengeluaran pemerintah dapat menopang proses pertumbuhan dan pada akhirnya pemerintah memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi (Dalamagas, 2010). Belanja publik untuk modal dan pendidikan adalah investasi yang mampu merangsang pertumbuhan (Butkiewicz dan Yanikkaya, 2011). Kebijakan distribusi alokasi pengeluaran pemerintah dan arah investasi yang tepat ke daerah-daerah dapat menciptakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah (Mudiarcana dan Marhaeni, 2018).

Berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah menuju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah dengan pembangunan ekonomi, sehingga setiap perencanaan dalam pembangunan akan mempertimbangkan semua potensi ekonomi (Jhingan, 2000:69). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang penting bagi daerah adalah pertumbuhan ekonomi (pendapatan perkapita) dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi. Selain itu nilai PDRB berdasarkan harga konstan menggambarkan daya beli dan kualitas hidup masyarakat (Rosyetti, 2009).

Tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku dan tujuan pembangunan (Hukom, 2014). Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Purwanti, 2009), karena angkatan kerja merupakan faktor produksi yang mampu

meningkatkan pendapatan nasional. Berdasarkan data dari BPS, Gambar 1. mengenai angkatan kerja, dapat dilihat bahwa trend jumlah angkatan kerja di provinsi Bali mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir, namun kesempatan kerja yang tersedia belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja.



Gambar 1. Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bali 2014-20178 (orang)

Sumber : BPS Provinsi Bali (data diolah)

Gambar 1 menunjukkan angkatan kerja dan kesempatan kerja di Provinsi Bali. Angkatan kerja di Provinsi Bali pada tahun 2018 mencapai 2.525.355 jiwa namun kesempatan kerja yang tercipta berjumlah 2.490.870 jiwa. Kesempatan kerja yang terbatas menyebabkan sejumlah tenaga kerja tidak memperoleh pekerjaan, atau disebut pengangguran (Rimbawan, 2012).

Tujuan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila tersedia kesempatan kerja bagi semua penduduk. Kesempatan kerja yang tersedia harus berkualitas, artinya mampu memberikan pendapatan yang menjamin kehidupan para pekerja dan anggota keluarganya secara layak. Penyerapan tenaga kerja harus diprioritaskan pada pembangunan industri padat karya, karena hal ini dapat mendukung pembangunan ekonomi. Investasi pada

sektor padat karya dapat menciptakan kesempatan kerja yang produktif di masyarakat. (Taufik, 2014).

Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali sangat beragam antara kabupaten/kota. Kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendapatan per kapita di kabupaten/kota Provinsi Bali meningkat setiap tahunnya, namun walaupun meningkat, masih terdapat ketimpangan pendapatan antar wilayah. Sejauh ini, sektor pertanian dan pariwisata serta sektor pendukung pariwisata lainnya masih menjadi ujung tombak perekonomian Bali. Tenaga kerja lebih banyak terserap di sektor pariwisata dan sektor pertanian menjadi sektor kedua yang menyerap tenaga kerja setelah sektor pariwisata. Hal ini menyebabkan hasil pariwisata Bali hanya dapat dinikmati oleh beberapa daerah saja. Kabupaten Badung masih menempati posisi dengan pendapatan per kapita tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Sedangkan pendapatan per kapita terendah didominasi oleh Kabupaten Bangli.

Karakteristik setiap daerah yang berbeda baik dari potensi sumber daya alam yang dimiliki dan letak geografis masing-masing daerah dapat mempengaruhi pola pembangunan setiap daerah yang menyebabkan kemampuan tumbuh yang berbeda. Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan baik di dalam pembangunan maupun hasil yang didapatkan. Ketimpangan sebuah pembangunan tersebut di dalamnya juga terdapat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota, 2016-2018 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
Jembrana	40.862	44.267	47.746
Tabanan	30.114	30.114	50.194
Badung	74.934	81.179	87.447
Gianyar	44.262	48.204	52.178
Klungkung	40.249	44.074	47.697
Bangli	24.384	26.751	28.893
Karangasem	32.646	35.506	38.463
Buleleng	42.594	46.609	50.363
Denpasar	47.235	51.407	55.277
Provinsi Bali	46.211	50.288	54.618

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2019

Tabel 1 menunjukkan pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku di kabupaten/kota Provinsi Bali. Kabupaten Badung memiliki pendapatan perkapita yang paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali, dengan pendapatan per kapita pada tahun 2018 sebesar Rp. 87,4 juta. Sedangkan pendapatan perkapita terendah oleh Kabupaten Bangli yaitu sebesar Rp. 28,8 juta. Pendapatan perkapita mencerminkan daya beli dan kualitas hidup masyarakat, yang selanjutnya akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut World Bank dalam (W Aprisal, 2014) *middle income trap* menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia. *Middle income trap* terjadi bila konsumsi lebih besar dari produktivitas. Untuk keluar dari jebakan kelompok negara berpendapatan menengah, diperlukan kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah dengan investasi, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Investasi atau kegiatan penanaman modal merupakan langkah awal dalam pembangunan ekonomi (Adnan, 2010). Pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat disebabkan oleh kurangnya modal (Agusty, 2015). Investasi asing langsung (FDI) memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan integrasi global negara-negara berkembang (Lipsey, 2015). Oleh

karena itu, pemerintah Indonesia telah mengizinkan investasi asing masuk ke dalam negeri tentunya dibawah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Lindblad, 2015).

Kebijakan otonomi daerah mampu memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Zouharier, 2012). Desentralisasi fiskal berkaitan terhadap PDRB, apabila pengeluaran publik lebih dipusatkan lagi (Vasques,2001). Pemerintah pusat memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah agar mampu secara mandiri mengatur pertumbuhan yang ada di wilayah, hal ini oleh banyak orang dilihat sebagai solusi terhadap perencanaan pusat yang terlihat sulit untuk dipahami dengan baik (Oates, 1993).

Peningkatan investasi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkatnya investasi (barang modal) akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Adipuryanti, 2015). Hasil penelitian sebelumnya oleh ; (a) Kim,1997, (b) Adams, 2009, (c) Gaikwad, 2013 (d) Aurangzeb, and Anwar 2012, (e) Irsania and Noveria (2014) juga menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya oleh Pratama (2019), menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Kadir *et al* (2016) menyatakan bahwa investasi dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kota Kendari. Danawati *et al* (2016), menyatakan bahwa

pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk ; (1) untuk mengkaji perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendapatan per kapita di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, (2) untuk menganalisis pengaruh investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali, (3) untuk menganalisis pengaruh investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali, (4) untuk menganalisis adakah pengaruh tidak langsung investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di sembilan wilayah kabupaten/kota Provinsi Bali. Alasan dipilihnya kabupaten/kota di Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian karena masih terjadinya ketimpangan pembangunan di masing-masing wilayah kabupaten/kota yang berdampak pada ketimpangan kesempatan kerja serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan variabel investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka dan dapat dihitung

dengan satuan hitung, sedangkan data kualitatif adalah data data yang berupa penjelasa-penjelasan atau uraian-uraian (Sugiyono, 2017:10). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data sekunder dan data primer. Titik pengamatan dalam penelitian ini adalah 72 pengamatan dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala yang sedang diteliti (Soeratno, 1993:91). Penelitian ini menggunakan teknik analisis tren dan analisi jalur (*path analysis*). Analisis tren digunakan untuk melihat kecenderungan naik atau turun variabel yang diteliti di masa depan. Analisis tren dalam penelitian ini menggunakan metode kuadrat terkecil, karena paling umum digunakan dan lebih baik untuk menentukan garis tren. Prinsip dari kuadrat terkecil adalah meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangan (selisih) nilai variabel bebas (Y_i) dengan nilai tren ramalannya. Rumus perhitungan sebagai berikut (Nata Wirawan, 2016 : 185).

$$Y = a + bX \dots\dots\dots(1)$$

$$a = \frac{\sum Y_i}{n} \dots\dots\dots(2)$$

$$b = \frac{\sum X_i Y_i}{\sum X_i^2} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

- Y : variabel terikat
- X : variabel bebas (periode waktu)
- a : intersep Y
- b : slope garis
- n : banyaknya pasangan data

Sedangkan analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel independent dan pengaruh tidak langsung melalui variabel intervening. Persamaan struktural dapat dilihat sebagai berikut:

Struktur I

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1 \dots\dots\dots(4)$$

Struktur II

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan:

Y_1 : Kesempatan Kerja

Y_2 : Kesejahteraan Masyarakat

X_1 : Investasi

X_2 : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

X_3 : Pengeluaran Pemerintah

e_1, e_2 : Standar Error

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$: Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X.

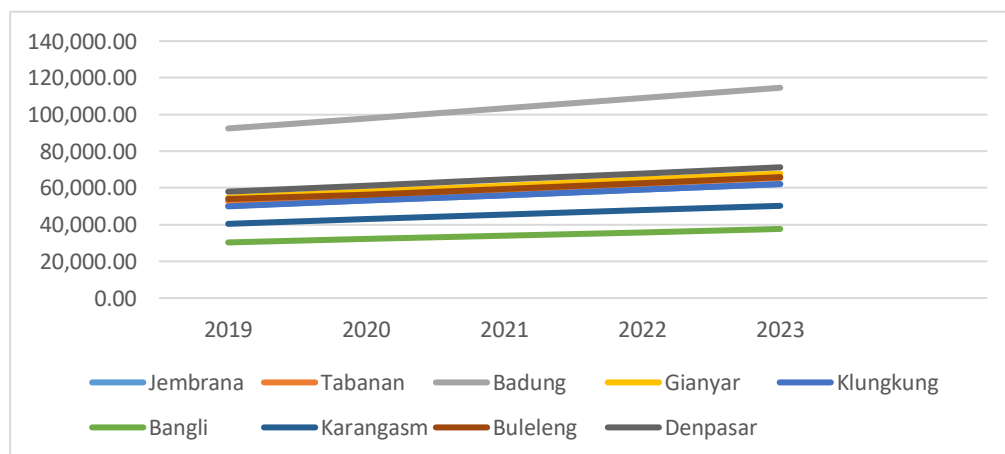
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Tren (Kecenderungan) Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Untuk menguji apakah ditahun-tahun yang akan datang kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendapatan per kapita pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali mempunyai kecenderungan meningkat ataupun menurun akan diuji dengan analisis trend. Metode kuadrat terkecil paling umum dan lebih baik untuk menentukan garis tren. Prinsip dari cara kuadrat terkecil yaitu meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangan (selisih) nilai variabel bebas (Y_i) dengan nilai tren/nilai ramalannya. Pengolahan data menggunakan program SPSS, menghasilkan persamaan sebagai berikut.

- 1) Kabupaten Jembrana $Y' = 35.356,686 + 2.963,617X$
- 2) Kabupaten Tabanan $Y' = 36.765,835 + 3.184,802X$
- 3) Kabupaten Badung $Y' = 64.678,464 + 5.544,507X$
- 4) Kabupaten Gianyar $Y' = 38.400,519 + 3.267,586X$
- 5) Kabupaten Klungkung $Y' = 34.718,231 + 3.044,861X$
- 6) Kabupaten Bangli $Y' = 21.077,946 + 1.840,630X$
- 7) Kabupaten Karangasem $Y' = 28.141,526 + 2.454,464X$
- 8) Kabupaten Buleleng $Y' = 36.762,486 + 3.236,089X$
- 9) Kota Denpasar $Y' = 41.374,509 + 3.318,568X$

Jadi dapat disimpulkan bahwa tren kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendapatan per kapita di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Bali mengalami tren positif atau cenderung meningkat pada tahun 2019 sampai 2023 dengan asumsi variabel lainnya konstan.



Gambar 2. Kecenderungan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten/kota Provinsi Bali, 2011-2018

Sumber : BPS Provinsi Bali (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2 kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendapatan per kapita memiliki tren positif atau cenderung meningkat. Kabupaten Badung memiliki rata-rata peningkatan pendapatan per kapita tertinggi diantara

kabupaten/kota yang lain, dengan peningkatan sebesar Rp. 5.544,507 per tahun, sedangkan Kabupaten Bangli memiliki rata-rata peningkatan pendapatan per kapita terendah diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Ramalan tren kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendapatan per kapita di Kabupaten Bangli meningkat hanya sebesar Rp. 1.840,630 per tahun, namun apabila Kabupaten Bangli dapat meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas, maka ramalan tren kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendapatan per kapita ini bisa lebih tinggi dari hasil proyeksi. Begitupun dengan Kabupaten Badung akan tetap menjadi kabupaten dengan pendapatan per kapita tertinggi di masa depan, jika dapat mempertahankan produktivitas dan meningkatkan kesempatan kerja di masyarakat. Ramalan tren kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendapatan per kapita pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kecenderungan meningkat dengan asumsi kondisi variabel-variabel yang digunakan saat ini sama dengan kondisi dimasa depan yaitu mengalami peningkatan..

2) Pengaruh Investasi, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

1) Persamaan regresi substruktural I :

Berdasarkan persamaan substruktural I dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan tenaga kerja di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adapun persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y_1 = -0,087X_1 + 0,624X_2 + 0,382X_3 + e_1$$

$$S_b = (0,002) \quad (2,390) \quad (11,467) \quad R_2 = 0,909$$

$$t = (-1,604) \quad (7,119) \quad (4,109) \quad F = 227,028$$

$$\text{sig} = (0,113) \quad (0,000) \quad (0,000)$$

2) Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural I :

Tabel 2 Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural I

Regresi	Koef. Reg. Standar	T hitung	P. Value/sig	Keterangan
X ₁ → Y ₁	-0,087	-1,604	0,113	Tidak Positif
X ₂ → Y ₁	0,624	7,119	0,000	Positif
X ₃ → Y ₁	0,382	4,109	0,000	Positif

Sumber : Data diolah, 2019

Keterangan :

X₁ : Investasi

X₂ : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

X₃ : Pengeluaran Pemerintah

Y₁ : Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan persamaan regresi substruktural I, F_{tabel} menunjukkan angka sebesar 227,028 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ berarti bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja sudah layak (*fit*).

Nilai *standardzise coefficient* beta variabel investasi sebesar -0,087 dengan signifikansi sebesar $0,113 > 0,05$ (nilai alpha), berarti bahwa H_0 diterima, H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa investasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali. Koefisien jalur bertanda negatif antara variabel investasi dan kesempatan kerja menunjukkan bahwa kenaikan investasi tidak diikuti oleh kenaikan kesempatan kerja atau sebaliknya. Menurut Sukirno (2008:138) investasi dapat menurunkan kegiatan

perekonomian, menurunkan pendapatan, menurunkan taraf kemakmuran masyarakat, serta tidak mampu menekan jumlah pengangguran apabila dikelola secara tidak tepat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wailaputri (2016), yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

Investasi tidak berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja dapat terjadi karena akumulasi kapital digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan canggih, sehingga menghambat upaya-upaya penciptaan lapangan kerja baru (Todaro, 2000:329). Faktor lain penyebab tidak adanya hubungan positif antara investasi dan kesempatan kerja adalah dimungkinkan karena adanya faktor struktural, kelembagaan dan politik, sehingga harga pasaran tenaga kerja menjadi lebih tinggi dibandingkan harga modal (Wasilaputri, 2016). Selain itu, investasi yang terjadi di provinsi Bali yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) cenderung di sektor pariwisata. Sehingga hal tersebut menyebabkan peluang kesempatan kerja yang tercipta hanya di daerah pariwisata. Disisi lain, investasi di sektor pariwisata yang berupa pengeluaran untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada (replacement) tidak dapat menyerap tenaga kerja baru. Penyerapan tenaga kerja dapat terjadi pada investasi yang mengarah ke sektor-sektor padat karya, seperti sektor industri tekstil, sektor perdagangan, sektor pertanian dan industri yang berorientasi ekspor.

Nilai *standardzise coefficient* beta dari variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga 0,624 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (nilai alpha), yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa pengeluaran

konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suciani dkk yang menyatakan bahwa konsumsi berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1995-2010 dan juga sejalan dengan hasil penelitian Kadir *et al* (2016) tentang konsumsi dan penyerapan tenaga kerja. Teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes menyatakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi masyarakat, didasarkan atas besar kecilnya pendapatan masyarakat, dan pengeluaran konsumsi akan meningkat jika bertambahnya penghasilan.

Kenaikan konsumsi masyarakat akan menyebabkan permintaan atas barang dan jasa meningkat. Ketika permintaan atas barang dan jasa meningkat, maka jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan akan meningkat. Untuk memproduksi barang dan jasa tersebut, produsen akan menambah faktor produksi, salah satunya adalah tenaga kerja. sehingga, dengan meningkatnya konsumsi rumah tangga akan menyebabkan terciptanya kesempatan kerja di masyarakat.

Nilai *standardzise coefficient* beta variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,382 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (nilai alpha), berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Danawati *et al* (2016). Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung teori Keynes dalam Dumairy (1997), yaitu dengan adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan

(*injection*) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Sutriyono (2011) tentang pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja. Menurutnya, pengeluaran pemerintah berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dapat memberikan multiplier effect di masyarakat, yaitu mendorong penerimaan masyarakat sehingga akan berdampak pada konsumsi dan tabungan masyarakat, serta mendorong permintaan secara keseluruhan. Kenaikan permintaan akan mendorong produsen untuk menambah investasi dan meningkatkan kapasitas produksi sehingga akan tercipta kesempatan kerja baru dimasyarakat.

3) Pengaruh Langsung Investasi, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Pemerintah dan Kesempatan Kerja terhadap Kesejahteraan Masyarakat

1) Persamaan regresi substruktural II

Berdasarkan persamaan substruktural II dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adapun persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y_2 = 0,032X_1 + 2,543X_2 - 0,268X_3 - 1,719Y_1 + e_2$$

$$S_b = (0,000) \quad (0,457) \quad (1,856) \quad (0,018) \quad R^2 = 0,892$$

$$t = (0,585) \quad (19,4410) \quad (-2,344) \quad (12,899) \quad F = 138,340$$

$$\text{sig} = (0,561) (0,000)(0,022)(0,000)$$

2) Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural II :

Tabel 3. Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural II

Regresi	Koef. Reg. Standar	T hitung	P. Value/sig	Keterangan
X ₁ → Y ₂	0,032	0,585	0,561	Positif
X ₂ → Y ₂	2,543	19,441	0,000	Positif
X ₃ → Y ₂	-0,268	-2,344	0,022	Tidak Positif
Y ₁ → Y ₂	-1,719	-12,899	0,000	Tidak Positif

Sumber : Data diolah, 2019

Keterangan :

X₁ : Investasi

X₂ : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

X₃ : Pengeluaran Pemerintah

Y₁ : Kesempatan Kerja

Y₂ : Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan persamaan regresi substruktural II, F_{tabel} menunjukkan angka sebesar 138,340 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ artinya bahwa model regresi yang diestimasi dari variabel investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sudah layak (*fit*).

Nilai *standardzise coefficient* beta variabel investasi sebesar 0,032 dengan nilai signifikansi sebesar $0,561 > 0,05$ (nilai alpha) berarti bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima. Hal ini berarti bahwa investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Jayanhti dan Arka (2019) yang menyatakan bahwa variabel investasi secara langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Penyebab

investasi tidak memiliki hubungan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah karena investasi di kabupaten/kota Provinsi Bali tidak merata, dimana investasi cenderung di daerah pariwisata, sehingga menyebabkan pola pembangunan menjadi tidak seragam dan penyerapan tenaga kerja menjadi tidak merata serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Investasi yang merata di setiap daerah dan diprioritaskan investasi ke sektor padat karya, dapat menciptakan kesempatan kerja di masyarakat, sehingga dengan terjadinya penyerapan tenaga kerja, maka kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Nilai *standardzise coefficient* beta variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 2,543 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (nilai alpha), berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mutolip (2016) yang menyatakan bahwa konsumsi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga. Konsumsi adalah tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 “kesejahteraan sosial adalah kondisi erpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya”.

Pengaruh positif antara pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap kesejahteraan masyarakat ini juga sejalan dengan penelitian Amanaturohim (2016)

yang menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan keluarga. Konsumsi rumah tangga mempunyai peran penting dalam tingkat kesejahteraan. Keluarga dapat mencapai kesejahteraan yang tinggi dengan cara konsumsi yang efektif dan efisien sesuai dengan pola konsumsi dan perilaku konsumen. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Wagle et al (2006) dan Hendrik (2011) yang menyatakan bahwa konsumsi berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Konsumsi rumah tangga yang akan menjadi pertimbangan adalah konsumsi barang dan jasa baru (Wagle et al, 2006). Sedangkan menurut Hendrik (2011) ukuran konsumsi rumah tangga terletak pada tingkat pendidikannya.

Nilai *standardzise coefficient* beta variabel pengeluaran pemerintah sebesar -0,268 dengan signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$ (nilai alpha), berarti bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Dalam suatu perekonomian, pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator dalam menciptakan kebijakan, baik di bidang fiskal maupun moneter. Pengeluaran pemerintah merupakan besarnya nilai output akhir pemerintah yang meliputi pembelian barang dan jasa, gaji pegawai, dan perkiraan penyusutan barang modal pemerintah dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nina dan Rustariyuni (2018). Menurutnya, dalam pengalokasian belanja modal, semakin banyaknya Pegawai

Negeri Sipil (PNS) di daerah, dimana APBD yang dialokasikan banyak untuk keperluan belanja tidak langsung. Perbedaan potensi fiskal pemerintah daerah antara satu daerah dengan daerah lainnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi setiap daerah menjadi beragam. Pemberian otonomi yang lebih besar akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat mendorong daerah untuk mengalokasikan secara efisien potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Nina dan Rustariyuni, 2018).

Nilai *standardzise coefficient* beta variabel kesempatan kerja sebesar -1,719 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (nilai alpha), berarti bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa kesempatan kerja tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Koefisien jalur bertanda negatif bermakna bahwa kenaikan kesempatan kerja tidak diikuti oleh kenaikan kesejahteraan masyarakat atau sebaliknya. Hal ini dapat disebabkan oleh elastisitas permintaan tenaga kerja yang tinggi, artinya kenaikan kesempatan kerja akan diikuti oleh penurunan tingkat upah atau sebaliknya. Selain itu, pengaruh tidak positif antara kesempatan kerja dengan kesejahteraan masyarakat, dapat disebabkan oleh kesempatan kerja didominasi oleh penduduk setengah menganggur, produktivitas rendah, kesempatan kerja yang tercipta tidak merata di seluruh wilayah atau kesempatan kerja yang tercipta sedikit, sehingga upah yang diterima tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Teori kemiskinan kontemporer pedesaan oleh Geertz (1997) menyatakan bahwa proses involusi pertanian yaitu proses pertumbuhan tanpa diikuti dengan perubahan menimbulkan pemerataan kemiskinan. Sektor pertanian terus menerus

menyerap tambahan angkatan kerja tanpa diikuti perubahan struktural. Akibatnya, mekanisme pembagian penghasilan yang relatif kecil, setelah ditambah angkatan kerja baru, pembagian hasil menjadi lebih kecil lagi, sehingga kesempatan kerja yang tercipta tersebut belum mampu mensejahterakan masyarakat.

Kesempatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tingkat upah. Tingkat upah dengan kesempatan kerja memiliki hubungan yang tidak negatif atau tidak searah. Semakin tinggi tingkat upah, maka semakin sedikit jumlah tenaga kerja yang diminta, sebaliknya semakin rendah tingkat upah, maka semakin banyak jumlah permintaan terhadap tenaga kerja. Selain itu, faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja adalah produktivitas. Jika produktivitas tenaga kerja meningkat, berarti untuk memproduksi jumlah yang sama akan dibutuhkan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit. Hal ini menunjukkan produktivitas di satu sisi berpengaruh negatif terhadap jumlah permintaan tenaga kerja dengan asumsi jumlah output yang akan diproduksi adalah tetap. Menurut Sulistiawati (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyebab hubungan negatif antara kesempatan kerja dengan kesejahteraan masyarakat adalah karena upah yang diterima tenaga kerja lebih rendah dari kebutuhan hidup yang layak atau upah yang diterima tenaga kerja belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika tenaga kerja memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang bersifat ekonomi maupun kebutuhan yang bersifat non ekonomi, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup layak.

Nilai Kekeliruan Taksiran Standar

Untuk mengetahui nilai e_1 dihitung dengan menggunakan rumus :

$$e_1 = \sqrt{1 - R_1^2}$$

$$= \sqrt{1 - 0,909}$$

$$= \sqrt{0,091}$$

$$= 0,302$$

Untuk mengetahui nilai e_2 dihitung menggunakan rumus:

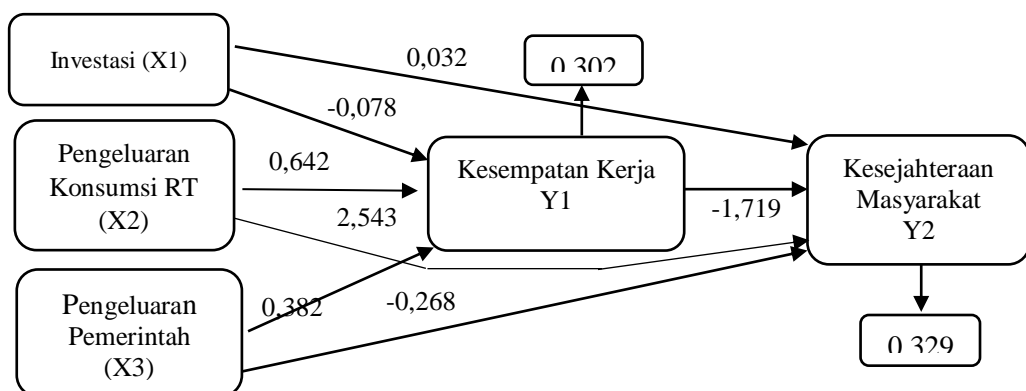
$$e_2 = \sqrt{1 - R_2^2}$$

$$= \sqrt{1 - 0,892}$$

$$= \sqrt{0,108}$$

$$= 0,329$$

Hubungan antar variabel penelitian secara lengkap juga disajikan pada diagram jalur Gambar 3.



Gambar 3. Koefisien Jalur Hubungan Antar Variabel Penelitian

Pemeriksaan Validitas Model

Terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan validitas model yaitu koefisien determinasi total, hasilnya sebagai berikut.

$$\begin{aligned}R^2m &= 1 - e_1^2 e_2^2 \\ &= 1 - (0,302^2)(0,329^2) \\ &= 1 - (0,091)(0,108) \\ &= 1 - 0,0098 \\ &= 0,99\end{aligned}$$

Keterangan :

R^2m : Koefisien determinasi total

e_1, e_2 : Nilai kekeliruan standar

Koefisien determinasi total atau $R^2m = 0,99$ memiliki arti bahwa 99 persen informasi yang terkandung dalam data dapat jelaskan oleh model, sedangkan sisanya 1 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

SIMPULAN

- 1) Kecenderungan kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendapatan per kapita di kabupaten/kota Provinsi Bali memiliki tren positif di tahun 2019-2023, dengan asumsi kondisi variabel-variabel yang digunakan saat ini sama dengan kondisi dimasa mendatang yaitu meningkat. Kabupaten Badung memiliki rata-rata peningkatan pendapatan per kapita tertinggi diantara sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan kabupaten Bangli memiliki rata-rata peningkatan pendapatan per kapita terendah diantara sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

- 2) Investasi tidak berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif dengan kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 3) Investasi dan pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesempatan kerja tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 4) Kesempatan kerja tidak memediasi pengaruh investasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

SARAN

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi yang tinggi di kabupaten/kota Provinsi Bali belum menunjukkan hubungan yang positif terhadap kesempatan kerja. Hal ini dapat terjadi jika investasi yang ditanamkan di daerah-daerah tidak merata, dan hanya difokuskan pada daerah pariwisata. Investasi di sektor pariwisata yang berupa investasi *replacement* tidak dapat menyerap tenaga kerja baru. Peningkatan investasi yang diperoleh setiap daerah harus lebih diperhatikan dan diprioritaskan terhadap investasi ke sektor-sektor padat karya, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah merupakan investasi pemerintah untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja daerah untuk penyediaan infrastruktur. Pengalokasian pengeluaran pemerintah dan investasi yang tepat sasaran dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang tinggi belum menunjukkan hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah sebaiknya lebih diarahkan penggunaannya sesuai kebutuhan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Adams, Samuel. 2009. Can Foreign Direct Investmen (FDI) Help To Promotegrowth In Africa African. *Journal of Bussiness Management*. Vol 3 (5).
- Adipuryanti, Ni L P Yuni dan Sudibia, I Ketut. 2015. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *PIRAMIDA* Vol. XI No. 1
- Adnan, P. Eko Prasetyo. 2010. Investment On The Community Income And The Economic Growth In Central Java. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura* Volume 13. Universitas Negeri Malang.
- Agusty, Gerry Julian and Damayanti, Sylviana Maya. 2015. The Effect Of Foreign Direct Investment & Official Development Assistance To Human Development Index Of Developing Countries In 2009-2013. *Journal Of Business And Management*. Vol. 4, No.8, 2015: 882-889
- Amanaturrohim, Hanifah dan Widodo, Joko. 2016. Pengaruh Pendapatan Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani

Penggarap Kopi Di Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung.
Economic Education Analysis Journal. Vol 5 (2) (2016).

Aurangzeb, and Anwar Ul Haq. (2012). Impact of Investment Activities on Economic Growth of Pakistan. *Business and Management Review* Vol. 2(1).

Badrudin, Rudy. 2009. Dampak Kegiatan Investasi Terhadap Pendapatan Per Kapita Masyarakat Kabupaten Sleman Pasca Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 3, No. 2

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Beraku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali. www.balibps.go.id

_____. 2019. Provinsi Bali Dalam Angka 2019.

_____. Kabupaten Jembrana. 2019 PDRB Pengeluaran Kabupaten Jembrana 2019.

_____. Kabupaten Tabanan. 2019. PDRB Pengeluaran Kabupaten Tabanan 2019.

_____. Kabupaten Badung. 2019. PDRB Pengeluaran Kabupaten Badung 2019.

_____. Kabupaten Gianyar. 2019. PDRB Pengeluaran Kabupaten Gianyar 2019.

_____. Kabupaten Klungkung. 2019. PDRB Pengeluaran Kabupaten Klungkung 2019.

_____. Kabupaten Bangli. 2019. PDRB Pengeluaran Kabupaten Bangli 2019.

_____. Kabupaten Karangasem. 2019. PDRB Pengeluaran Kabupaten Karangasem 2019.

_____. Kabupaten Buleleng. 2019. PDRB Pengeluaran Kabupaten Buleleng 2019.

_____. Kabupaten Denpasar. 2019. PDRB Pengeluaran Kabupaten Tabanan 2019.

Butkiewicz, J., and Yanikkaya, H. (2011). Institutions and The Impact of Government Spending on Growth. *Journal of Applied Economics*. Vol XIV, No.

Craig David, Porter Doug. 2003. Poverty Reduction Strategy Papers: A New Convergence. *World Development* Vol. 31, No. 1.

Danawati et al. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.7 (2016): 2123-2160.

Dalamagas, Basil. 2010. Public Sektor and Economic Growth: the Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32 (3), 227-228.

Gaikwad, Pratibha S. 2013. The Impact of Foreign Direct Investment (FDI) on Gross Domestic in Indian Economy. *Information Management and Business Review*, 5(8).

Geertz, Clifford. 1974. *Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta : Bhatara Karya Aksara.

Heryendi, Wycliffe Timotius dan Marhaeni, A.A.I.N. Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKs) di Kecamatan Denpasar Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 6 (2). ISSN : 2301 – 896.

Hendrik. (2011). Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau pulau Besar dan Danau Bawah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, volume 16. No 1 ; Universitas Riau.

Hukom, Alexandra. 2014. Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol 7, No 2.

Irsania, Dea Vibby and Noveria, Ana. 2014. The Relationship Among Foreign Direct Investment, Inflation Rate, Unemployment Rate, and Exchange Rate To Economic Growth in Indonesia. *Journal Of Business and Management*. Vol. 3, No 5.

Kim, Sung Tai. 1997. The Role of Local Public Sectors in Regional Economic Growth ini Korea, *Asian Economic Journal*, 11.

Kusuma, Hendra. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], july 2016. ISSN 2303-0186.

- Lindblad, J. Thomas. 2015. Foreign Direct Investment In Indonesia : Fifty Years Of Discourse. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 51 (2)
- Lipsey, Robert E and Sjöholm, Fredrik. 2011. Foreign Direct Investment And Growth In East Asia: Lessons For Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 47, No. 1, 2011: 35–63.
- Mudiarcana, Gede Navo dan Marhaeni, A.A.I.N. (2018). Analisis Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7 [6] : 1112-1139. ISSN : 2303-0178.
- Mutolip, Abdul Muh. (2016). Hubungan Prinsip Konsumsi Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Muslim Pada Pembuat Kue di Kelurahan Menteng Palangkaraya. Skripsi. Diakses pada Minggu, 29 September 2019. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/437/1/Abstrak%20%28MU%29.pdf>
- Nata Wirawan, I Gusti Putu. (2016). *Cara Mudah Memahami Statistika Ekonomi Dan Bisnis* (Statistika Deskriptif). Keraras Emas. Denpasar
- Oates, Wallace E. (1993). Fiscal Decentralization and Economic. *Development National Tax Journal*. Vol. 46, no. 2.
- Purwanti, Paramitha Ayu Putu. 2009. Analisis Kesempatan Kerja Sektor di Kabupaten Bangli dengan Pendekatan Pertumbuhan Berbasis Ekspor. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Vol V. No 1
- Rustariyuni, Surya Dewi. 2014. Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *PIRAMIDA* Vol. X No. 1 : 45 – 55. ISSN : 1907-3275.
- Soeratno dan Arsyad, Lincoln. (1993). *Metodologi Penelitian. Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : Unit Penerbit Percetakan AMP YKPN
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- _____.(2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 472.

Pengaruh Investasi....[Diah Windu Antari dan Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni]

Vasques, Jorge Martinez and Robert M. Mc-Nab. (2001). Fiscal Decentralization, Macrostability, and Growth. *Journal of Political Econom.* Hal 423-435

Wagle, R. Udayana. (2006). Poverty in Kathmandu: What do subjective and objective economic welfare concepts suggest ?.USA:Westren Michigan University. Dalam *Jurnal Ekonomi Inequal* Volume 5

Warsita, Wika Mnadala dan Marhaeni. A.A.I.N. 2015. Pengaruh Pdrb Per Kapita, Pendidikan Ibu, Dan Pelayanan Kesehatan Terhadap Angka Kematian Bayi Di Provinsi Bali. *PIRAMIDA* Vol. XI No. 1 : 35 - 40 ISSN : 1907-3275.

Wiagustini, Ni Luh Putu dkk. 2017. Potensi Pengembangan Investasi Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.* Vol 10. No 2,

William A. McEachern. 2000. *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer* terjemahan: Sigit Triandaru, (Jakarta: Salemba Empat)

Yasa Artana Oka, Arka Sudarsana. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.* 8(1).

Yustika Ahmad Erani. 2006. *Perekonomian Indonesia, Deskripsi, Prediksi, dan Kebijakan.* Jawa Timur : Bayu Media Publishing.

Zouhaier, H. (2012). Institutions, Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Finance.* Vol. 4, No. 2